

## KERAPU (Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan)

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan program penangkapan berbasis kuota untuk perikanan tangkap di sejumlah wilayah perikanan. KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 jutaton.

Ada juga program *Blue Halo-S*, yang memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar atau luar

kawasan konservasi. Selanjutnya, perusahaan atau kelompok usaha yang menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya ikan di *Blue Halo-S*, harus berinvestasi dalam pengelolaan konservasi jangka panjang seperti: patroli berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi biologis dan sosial, pembangunan kesadaran masyarakat, pengembangan pendidikan dan mata pencaharian, dikelola bersama oleh pemerintah. Diharapkan konsep ini akan menjadi sistem pembiayaan baru untuk konservasi agar tidak tergantung pada APBN atau APBD. Juga dapat menjadi program

Kementerian/Lembaga dengan mengkaji secara bioekonomi, manajemen perikanan, dan aspek legal. Proyek percontohan akan dilaksanakan di Fakfak dan Misool, Papua Barat. ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id))



## JARING EKONOMI PESISIR



Koperasi menjadi salah satu tempat peminjaman modal bagi para pelaku usaha seperti yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Perikanan Laut (KPPL) Ngupaya Mina yang memberikan modal bagi nelayan di Indramayu, Jawa Barat. KPPL Ngupaya Mina yang telah berdiri sejak tahun 1968, terus

mengalami perkembangan usaha. Saat ini, usahanya meliputi usaha pelelangan ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan merintis warung serba ada (Waserda) untuk perbekalan nelayan yang menjual sembako, peralatan mesin hingga jaring ikan. Saat ini para nelayan dapat dengan mudah memenuhi perbekalan melaut. Hal ini terjadi karena adanya pinjaman modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). ([jawapos.com](http://jawapos.com))

## KAKAP (Kabar Perikanan Tangkap)

Peraturan Daerah terindikasi membebani nelayan kecil lantaran pungutan retribusi izin daerah dan harga BBM yang lebih mahal. Salah satu implikasinya adalah data produksi penangkapan ikan yang tercatat oleh pemerintah. *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia menyebutkan, saat ini nelayan kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merasakan beban pengeluaran yang lebih tinggi dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Sejumlah nelayan kecil dari Maluku dan Maluku Utara yang diwajibkan membayar retribusi izin daerah ketika akan mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI). Akibatnya, banyak kapal

nelayan kecil yang tidak mendaftarkan kapalnya dan tidak melaporkan hasil tangkapan karena merasa terbebani dan tidak mau membayar retribusi perizinan. ([Kompas.com](http://Kompas.com))



## INOVASI



Mencari tahu bagaimana kita bisa makan lebih

berkelanjutan akan menjadi masalah yang berkelanjutan karena dunia menjadi lebih padat dan krisis iklim meningkat. Alternatif yang lebih hijau (dan sadar kesejahteraan hewan) sedang dieksplorasi – yang terbaru adalah alga. Kita tidak bisa begitu saja beralih ke laut, karena kita biasanya makan ikan karnivora seperti Tuna dan Cod. Jika kita kemudian

beralih ke laut untuk [hanya] memakan karnivora, kita akan mengacaukan lautan. Itulah mengapa sangat penting untuk membuat lebih banyak orang makan alga, sayuran, dari dasar laut agar kita bisa mengeksplorasi laut secara berkelanjutan untuk memberi makan lebih banyak orang. ([independent.co.uk](http://independent.co.uk))

**TAMBAK** (Berita Budidaya Perikanan)



Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Provinsi dengan rumah tangga perikanan budidaya laut terbanyak di skala nasional yaitu 27.116 rumah tangga. Disusul Sulawesi Tengah dan Jawa Timur yang masing-masing berjumlah 12.313 dan 8.039 rumah tangga. Selanjutnya, sebanyak 7.335 rumah tangga perikanan budidaya laut ada di Sulawesi Tenggara, dan di Maluku sebanyak 6.157 rumah tangga.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah rumah tangga perikanan budidaya laut di Tanah Air mencapai 126.193 rumah tangga pada 2020. Angka ini meningkat 0,91% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 125.045 rumah tangga. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) menyebutkan, luas lautan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, total potensi ekonominya diperkirakan mencapai US\$1,3 triliun per tahun atau lebih dari enam kali lipat APBN 2021 yang senilai US\$196,43 miliar. (katadata.co.id)

**MELAUT** (Menelisk Garam dan Rumput Laut)



Harga rumput laut mencapai 30 ribu per kg di wilayah Bali, namun sayangnya harga ini tidak selalu konsisten seharga tersebut. Tidak jarang harga rumput laut perkilogramnya hanya dibandrol 15 rb hingga 18 rb. Sementara itu, harga bibit pun meningkat mencapai 50 rb per ikat dari harga awal berkisar 30rb per ikat. (Tribunnews.com)



Banyak pengusaha garam yang gulung tikar selama masa pandemi covid-19. Amin Muhaemin misalnya, pria berusia 43 tahun asal Indramayu, Jawa Barat yang tergabung dalam Koperasi Garam Inti Rakyat mengalihkan lahan garam miliknya untuk menggarap komoditas lain, yakni budidaya ikan dan udang. Perlu diketahui, dirinya sudah menggeluti usaha garam sejak tahun 2009 dengan luas lahan sebesar 23 hektar. (Jawapos.com)



**KORAL** (Konservasi dan Ruang Laut)



KKP melalui PSDKP menemukan adanya praktik ilegal dan pencemaran di Perairan Matras Bangka, dimana ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pembuangan *tailing* yang tidak memperhatikan standar pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir. (kkp.go.id)

**KABAR DARI DPD**

- **26 Februari 2022**  
KNTI Rembang menggelar FGD inisiasi Sekolah Nelayan
- **4 Maret 2022**  
Pengurus Media KNTI menggelar kegiatan rutin Forum Media KNTI

**PASAR IKAN**

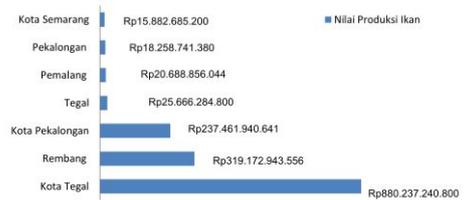
**Harga Ikan** (harga tingkat pedagang)  
source : pipp kkp

PP Palabhanratu Layur Rp. 35.000/kg	PP Muncar Lemuru Rp. 9.000/kg
PP Bungus Madidihang Rp. 42.000/kg	PP Pancer Teri Rp. 21.500/kg

**TERASI** (Teras Statistik)

Nilai Produksi Ikan

Nilai Produksi Ikan di Pelabuhan Jawa Tengah Tahun 2019 Semester ke 2



sumber : DKP Prov Jateng

**KALENDER NELAYAN**

- 13 Mar 2022** **MUSWIL I KNTI JATENG**  
KNTI Jawa Tengah akan menggelar Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ke 1 di Kabupaten Batang
- 06 Mar 2022** **MUNAS HIMITEKINDO ke XIII**  
Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (HIMITEKINDO) akan melangsungkan MUNAS HIMITEKINDO ke XIII di Universitas Riau, Pekanbaru.

**KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN**



**Pembangunan Perikanan:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pekerja perikanan, dan masyarakat luas melalui: (a) produktivitas yang lebih tinggi dalam pemanfaatan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran ikan melalui peningkatan teknologi dan pengaturan kelembagaan dan organisasi yang lebih efisien; (b) produktivitas sumber daya manusia yang lebih tinggi melalui pendidikan, layanan kesehatan dan fasilitas sosial yang lebih baik, dan (c) kehidupan yang lebih aman melalui asuransi dan perlindungan yang lebih baik dari guncangan ekonomi, kecelakaan, dan bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.

**CADIK** merupakan buletin mingguan yang diterbitkan oleh DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai media informasi dan meningkatkan literasi isu kelautan dan perikanan.

**Penanggung Jawab:**  
M. Riza Damanik, Ketua Umum KNTI

**Redaktur:**  
Dani Setiawan, Iin Rohimin, Hendra Wiguna, Chuldyah J. Harsindhi, Intan RoihatulJannah Hasly, Alhafiz Atsari

**Penata Letak:** Rois S. Q. Haq

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Mimosa I, Blok A No. 3 Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia 12510. Email: dpp@knti.or.id | dppknti@gmail.com